

IMPLEMENTASI PROGRAM BEASISWA PENDIDIKAN PANCAKARSA DI KABUPATEN BOGOR TAHUN 2022

Adalia Kenya
kenyaadalia@gmail.com

Departemen Politik dan Pemerintahan, FISIP,
Universitas Diponegoro
Laman : www.fisip.undip.ac.id Pos-el : fisip@undip.ac.id

ABSTRAK

Pendidikan merupakan hal penting dalam kehidupan, tetapi masih banyak masyarakat yang tidak bisa menempuh pendidikan hingga ke jenjang yang lebih tinggi karena beberapa faktor. Faktor utama penyebab kurangnya angka pendidikan adalah permasalahan biaya pendidikan yang tergolong tidak murah. Pemerintah Kabupaten Bogor menawarkan Beasiswa Pancakarsa kepada generasi muda di kabupaten tersebut yang berusia 16 hingga 30 tahun, baik yang baru memulai maupun yang sedang mengikuti program sarjana. Dengan batasan maksimal Rp 10.000.000 setiap semester, besaran beasiswa disesuaikan dengan Uang Kuliah Tunggal di masing-masing universitas mitra. Beasiswa diberikan maksimal delapan semester, atau sampai lulus. Tujuan dari dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui keberlangsungan implementasi program Beasiswa Pancakarsa dan permasalahan yang dihadapi dalam keberlangsungannya. Penelitian ini menggunakan teori implementasi kebijakan yang dicetuskan oleh Merilee S. Grindle. Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara terstruktur dan pengambilan data dari dokumen terkait, adapun teknik analisis data meliputi reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwasanya dalam pengimplementasian program Beasiswa Pancakarsa walaupun sudah berjalan secara baik dan rutin, tetapi masih ada permasalahan yang menjadi hambatan dalam pengimplementasiannya seperti web yang sering down dan permasalahan kurangnya komunikasi antara Tim Koordinasi Pengelola Beasiswa Pancakarsa (TKPBP) dengan para pendaftar beasiswa. Sampai saat ini beasiswa pancakarsa masih terus berjalan dan membiayai pendidikan perguruan tinggi bagi para pemuda Kabupaten Bogor dan masih terus memperbaiki kekurangan-kekurangan yang ada dalam kebijakan ini. Sudah seharusnya pihak TKPBP mendapatkan pendidikan dan latihan untuk mengatasi web yang sering down dan terus membangun komunikasi yang baik antara TKPBP dengan para pendaftar dan penerima Beasiswa Pancakarsa.

Kata kunci: Beasiswa Pancakarsa; Uang Kuliah Tunggal; Implementasi Kebijakan

ABSTRACT

Education is an important thing in life, but there are still many people who cannot pursue education to a higher level due to several factors. The main factor causing the lack of education is the problem of education costs which are not cheap. The Bogor Regency Government offers the Pancakarsa Scholarship to young people in the district aged 16 to 30 years, both those who are just starting out and those who are currently taking undergraduate programs. With a maximum limit of IDR 10,000,000 per semester, the scholarship amount is adjusted to the single tuition fee at each partner university. Scholarships are awarded for a maximum of eight semesters, or until graduation. The purpose of this research is to determine the sustainability of the implementation of the Pancakarsa Scholarship program and the problems faced in its continuity. This research uses the policy implementation theory coined by Merilee S. Grindle. This research method uses qualitative research methods with data collection techniques through structured interviews and data collection from related documents, while data analysis techniques include data reduction, data presentation, and drawing conclusions. The results of this research show that in implementing the Pancakarsa Scholarship program, although it has been running well and regularly, there are still problems that become obstacles in its implementation, such as the website which is often down and the problem of lack of communication between the Pancakarsa Scholarship Management Coordination Team (TKPBP) and scholarship applicants. Until now, the Pancakarsa scholarship is still running and financing tertiary education for the youth of Bogor Regency and is still continuing to improve the shortcomings in this policy. TKPBP should receive education and training to overcome frequently downed websites and continue to build good communication between TKPBP and Pancakarsa Scholarship applicants and recipients.

Keywords: Pancakarsa Scholarship; Single Tuition fee; Policy Implementation

PENDAHULUAN

Pendidikan tinggi adalah sumber pendidikan tinggi, yang berfungsi sebagai blok bangunan terakhir dari semua tingkat pendidikan. Menurut Ramdhani dan Suryadi (2006), perguruan tinggi merupakan organisasi yang tugas utamanya memajukan ilmu pengetahuan. Ia juga bertugas menciptakan generasi muda yang mampu mengatasi hambatan di era globalisasi saat ini. Generasi muda yang dihasilkan di perguruan tinggi maupun mahasiswa saat ini memainkan peran penting dalam memilih cara di mana negara ini akan maju. Untuk dapat berkontribusi dalam proses pembangunan dan memajukan negara, siswa harus memiliki kapasitas kemampuan yang di atas rata-rata mayoritas kelompok lain.

Memperoleh pendidikan yang berkualitas tentu membutuhkan biaya yang tidak sedikit, hal ini lah yang membuat banyak anak-anak di Indonesia yang tidak bersekolah dan tidak bisa melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Stigma pemikiran masyarakat Indonesia yang berfikir bahwa jika tidak memiliki biaya, maka tidak bisa melanjutkan pendidikan, membuat semakin banyaknya masyarakat yang tidak berpendidikan. Berdasarkan Kemenristekdikti, dilansir dari <https://bogorkab.go.id> terdapat 65% lulusan SMA/SMK tidak meneruskan pendidikan ke jenjang kuliah, maka dapat dikatakan masyarakat Indonesia yang menempuh pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi masih rendah dan

baru mencapai 34.58% dari populasi pendidikan.

Beasiswa memiliki jenis yang beragam, mulai dari beasiswa PPA, Beasiswa BBM, Beasiswa Bidik Misi dari Dirjen Dikti, Beasiswa Pemda dari Pemerintah Daerah kabupaten/kota dan provinsi, Beasiswa dari Bazda dan Baznas, Beasiswa Prestasi akademik dari Yayasan Pendidikan PDR Padang Sumatera Barat, Beasiswa Supersemar dari Yayasan Supersemar, dan Beasiswa dari PT. Bank Syariah Mandiri. Bagi mahasiswa kurang mampu namun berprestasi akademik dengan IPK minimal 3,00, Pemerintah Kabupaten/Kota dan Provinsi menawarkan beasiswa Pemda (UPGRISBA, 2022).

Dalam rangka menggerakkan dan mendorong peningkatan sektor ekonomi, Kabupaten Bogor telah menetapkan pembangunan sektor pendidikan sebagai prioritas. Hal ini merupakan komponen inisiatif untuk meningkatkan sumber daya manusia, yang sangat penting bagi pembangunan daerah. Hal ini dimaksudkan agar melalui pendidikan akan tercipta orang-orang baik yang akan mendukung sosial budaya, pembangunan ekonomi, dan berbagai disiplin ilmu lainnya. Karena ukurannya yang besar dan demografi usia yang didominasi anak muda, Kabupaten Bogor memiliki kewajiban besar untuk memastikan bahwa anak-anak menerima pendidikan yang berkualitas. Seiring dengan masalah kependudukan, persebaran penduduk tersebut juga berdampak pada bagaimana pendidikan dikembangkan di Kabupaten Bogor.

Pada tahun 2021 angka usia pemuda di Kabupaten Bogor mulai usia 16 tahun sampai 30 tahun sebanyak 1,32 juta orang dengan angka peserta didik Tingkat Menengah Atas (SMA, SMK, dan MA negeri dan swasta) sebesar 220.200 orang

dan 31.221 orang merupakan angka mahasiswa pendidikan tinggi negeri dan swasta. Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Tinggi di Kabupaten Bogor berada diatas APK Provinsi Jawa Barat, tetapi masih berada dibawah angka nasional dengan perolehan 25,02% untuk APK Pendidikan Tinggi Kabupaten Bogor, 21,09% untuk APK Pendidikan Tinggi Jawa barat, dan 34,8% APK Pendidikan Tinggi Nasional (Pemerintah Kota Bogor, 2021).

Di Kabupaten Bogor terdapat program Pancakarsa yang dicetuskan oleh bupati Kabupaten Bogor Ade Yasin diperiode kepemimpinannya tahun 2018-2023 dan menjadi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2018-2023. Terdapat lima tekad, yaitu Karsa Bogor Sehat, Karsa Bogor Cerdas, Karsa Bogor Maju, Karsa Bogor Membangun, dan Karsa Bogor Berkeadaban. Peningkatan kualitas hidup warga Kabupaten Bogor merupakan salah satu upaya pemerintah. Upaya ini membutuhkan kerja sama tim, terutama dari kalangan muda. Agar generasi muda memiliki dampak positif dan signifikan terhadap pembangunan masyarakat, penting untuk mendukung pendidikan mereka dan memanfaatkan kemampuan dan potensi mereka. Berdasarkan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Bogor menetapkan Beasiswa Pancakarsa sebagai pintu gerbang pendidikan tinggi bagi generasi muda cerdas dari Bogor. Beasiswa Pancakarsa merupakan salah satu upaya Pemerintahan Kabupaten Bogor

untuk merealisasikan salah satu karsa dari Pancakarsa Kabupaten Bogor yaitu Karsa Bogor Cerdas.

LANDASAN TEORI

Implementasi Program

Implementasi menurut Grindle (1980), adalah prosedur tindakan administratif yang luas yang dapat dilihat sampai batas tertentu. Selain itu, Grindle (1980) mencatat bahwa menetapkan tujuan dan sasaran, merencanakan jadwal kegiatan, dan mengalokasikan dana merupakan prasyarat untuk memulai proses implementasi. Metode yang dirancang Grindle untuk mengimplementasikan kebijakan publik disebut sebagai "implementation as a political and administrative process" atau "implementasi sebagai proses politik dan administratif", yang pengukuran keberhasilan implementasi kebijakan tersebut dilihat dari dua aspek, yakni:

- a. Dilihat dari prosesnya, dengan mempertanyakan apakah pelaksanaan kebijakan sesuai dengan yang ditentukan dengan merujuk pada aksi kebijakannya.
- b. Apakah tujuan kebijakan tercapai. Dimensi ini diukur dengan melihat dua faktor yaitu dampak atau efeknya pada masyarakat secara individu atau kelompok dan tingkat perubahan yang terjadi serta penerimaan kelompok sasaran dan perubahan yang terjadi.

Berdasarkan teori Grindle, kesuksesan dari implementasi suatu kebijakan sangat dipengaruhi oleh tingkat keterlaksanaannya, kebijakan yang dimaksud terdiri atas:

- a. Isi Kebijakan (Content of Policy)
 1. Kepentingan yang mempengaruhi. Kepentingan

- yang mempengaruhi ini terkait dengan beragam kepentingan yang mempengaruhi bagaimana suatu kebijakan diimplementasikan.
2. Tipe manfaat. Isi kebijakan bertujuan untuk menunjukkan atau memperjelas bahwa suatu kebijakan harus mencakup berbagai manfaat yang menunjukkan dampak positif. Kepentingan yang mempengaruhi ini terkait dengan beragam kepentingan yang mempengaruhi bagaimana suatu kebijakan diimplementasikan.
 3. Skala perubahan yang ingin dicapai. Setiap kebijakan memiliki tujuan yang ingin dicapai. Skala yang jelas harus ada dalam penjelasan kebijakan tentang isinya.
 4. Letak pengambilan keputusan. Apakah letak suatu program tepat, pengambilan keputusan dalam suatu kebijakan sangat penting untuk implementasinya.
 5. Pelaksanaan program. Seorang pelaksana kebijakan yang berpengetahuan dan cakap diperlukan untuk keberhasilan implementasi suatu kebijakan atau program.
 6. Sumber daya yang digunakan. Agar

implementasi kebijakan berhasil, diperlukan sumber daya pendukung.

b. Lingkungan Implementasi (Context of Implementation)

1. Kekuasaan. Kepentingan-kepentingan dan strategi dari aktor yang terlibat (Kekuatan, Kepentingan, dan Strategi Aktor yang Terlibat). Untuk memperlancar implementasi suatu kebijakan, penting juga untuk mempertimbangkan kekuatan atau kewenangan, kepentingan, dan taktik yang digunakan oleh para aktor yang terlibat.
2. Karakteristik lembaga dan rezim yang berkuasa. Keberhasilan suatu kebijakan juga dipengaruhi oleh lingkungan di mana kebijakan itu diimplementasikan; Bagian ini menjelaskan ciri-ciri lembaga yang juga akan berdampak pada suatu kebijakan.
3. Tingkat kepatuhan dan respon dari pelaksana. Pada titik ini, sejauh mana kepatuhan dan respons implementasi kebijakan dapat dilihat.

Dalam penelitian kali ini, peneliti menggunakan teori implementasi kebijakan dari Merilee Serrill Grindle yang dimana menjelaskan bahwa implementasi kebijakan dilihat keberhasilannya dari proses dan tujuan capaian kebijakan tersebut. Alasan peneliti memilih teori Grindle karena pada penelitian kali ini peneliti membahas mengenai implementasi kebijakan beasiswa Pancakarsa yang telah

berlangsung pada tahun 2022 dengan melihat proses dan capaian dari pengimplementasian beasiswa Pancakarsa.

a. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif untuk menggambarkan permasalahan yang sebenarnya terjadi di lapangan. Situs penelitian berada pada Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bogor. Subjek dalam penelitian ini yaitu Staff Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bogor Kepala sub-bidang layanan kepemudaan, Tim Koordinasi Pengelola Beasiswa Pancakarsa, Pendaftar beasiswa Pancakarsa, dan penerima beasiswa Pancakarsa. Sumber data penelitian ini diperoleh melalui teknik observasi, wawancara, dan dokumen.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Beasiswa Pancakarsa

Beasiswa Pancakarsa yang merupakan kebijakan yang dibuat dan diimplementasikan oleh Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bogor ini tentunya melewati proses yang panjang sampai akhirnya kebijakan Beasiswa Pancakarsa ini

dapat diimplementasikan. Adanya kebijakan Beasiswa Pancakarsa ini dilatar belakangi dengan:

1. Untuk meningkatkan kualitas sumberdaya manusia pada tingkat pendidikan tinggi yang mampu bersaing di kancah lokal, nasional dan global, dalam mewujudkan Indonesia Emas,

pada tahun 2045.

2. Melaksanakan salah satu Program Pancakarsa dari Bupati dan Wakil Bupati Bogor periode tahun 2018-2023 yaitu “Karsa Bogor Cerdas” sebagai upaya mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas.

3. Melaksanakan salah satu ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor No.1 Tahun 2020 tentang Pembangunan Kepemudaan pada Pasal 54 ayat (1) yang berbunyi “ Pemerintah Daerah memberikan penghargaan kepada a. Pemuda yang berprestasi”.

Kebijakan Beasiswa Pancakarsa ini berlandaskan pada dasar hukum sebagai berikut:

1. Undang Undang No. 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan;

2. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor No.4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah 2018-2023;

3. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor No.1 Tahun 2020 tentang Pembangunan Kepemudaan;

4. Peraturan Bupati Bogor Nomor 73 tahun 2022 tentang Pemberian Beasiswa Pancakarsa bagi Pemuda Berprestasi;

5. Surat Keputusan Bupati Bogor Nomor 400.3/323/Kpts/Per-UU/2022 Tanggal 24 Oktober 2022 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Pengelolaan Beasiswa Pancakarsa;

6. Surat Keputusan Bupati Bogor Nomor: 400.3/387/Kpts/Per-UU/2022, Tanggal 14 Desember 2022 tentang Penerima Beasiswa Pancakarsa bagi Pemuda Berprestasi Tahun 2022;

7. Surat Keputusan Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bogor

selaku Ketua Tim Koordinasi Pengelolaan Beasiswa Pancakarsa Nomor : 800/3080-Kpts/X-Bid LK Tanggal 27 Oktober 2022 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Beasiswa Pancakarsa.

Segala informasi terkait Beasiswa Pancakarsa, mulai dari tanggal pendaftaran, ketentuan, sampai penutupan pendaftaran dan pengumuman dapat dilihat di akun media sosial Beasiswa Pancakarsa yaitu instagram dengan nama akun *@beasiswapancakarsa*. Pada tahun 2022, Selama proses pendaftaran terdapat 1.795 orang yang berhasil melengkapi seluruh berkas yang menjadi syarat pendaftaran secara online melalui proses seleksi administrasi dan prestasi. Seluruh proses pendaftaran sampai melengkapi berkas dilakukan di web Beasiswa Pancakarsa *beasiswapancakarsa.bogorkab.go.id* yang bisa diakses oleh para pendaftar.

Pemerintah Kabupaten menjalankan program beasiswa bernama Beasiswa Pancakarsa Bogor untuk kaum muda Kabupaten Bogor, termasuk mereka yang akan memulai dan mereka yang sedang menempuh pendidikan sarjana, berusia 16 hingga 30 tahun. Besaran beasiswa dibatasi sebesar Rp10.000.000 setiap semester dan disesuaikan dengan UKT di masing-masing universitas mitra. Beasiswa diberikan sampai dengan 8 (delapan) semester, atau sampai lulus dengan minimal IPK 3.50 persemesternya. Tim Koordinasi Pengelolaan Beasiswa Pancakarsa mengawal beasiswa

secara terbuka dan tidak memihak (TKPBP). TKPBP dibentuk sesuai dengan Keputusan Bupati Bogor Nomor 422.5/573/Kpts/Per-UU/2020 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Pengelolaan Beasiswa Pancakarsa dan Peraturan Bupati Bogor Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Beasiswa Pancakarsa Bagi Pemuda dengan Prestasi (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2020 Nomor 100).

Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bogor menjabat sebagai Ketua Tim Koordinasi TKPBP yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor. Sekretariat dijalankan oleh Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bogor. Beasiswa Pancakarsa harus direncanakan, dikelola, dipantau, dan dievaluasi oleh TKPBP.

Program beasiswa Pancakarsa Kabupaten Bogor yang diselenggarakan oleh Dinas Pemuda dan Olahraga (DISPORA) Kabupaten Bogor telah terlaksana mulai dari tahun 2021. Nina Nurmasari selaku kepala bidang kepemudaan DISPORA kabupaten Bogor mengatakan bahwa Rp 5.900.000.000 telah dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Kota Bogor melalui APBD tahun 2021 yang digunakan sebagai Beasiswa Pancakarsa untuk seluruh penerima beasiswa tersebut. Pada tahun 2021 Pemerintah Kabupaten Bogor memberikan 1.200 beasiswa kuliah untuk pemuda-pemudi berprestasi Kabupaten Bogor hingga lulus jenjang S1 di seluruh universitas negeri dan swasta di Indonesia. Penerima Beasiswa Pancakarsa dipilih melalui Keputusan Bupati, dan wajib menandatangani Kontrak Studi dan Pakta Integritas. Website Beasiswa Pancakarsa

dan media cetak/online mempublikasikan nama-nama calon penerima Beasiswa Pancakarsa 2021 yang telah dipilih oleh Bupati. Dana dari Beasiswa Pancakarsa disalurkan sesuai Perjanjian Kerja Sama dengan perguruan tinggi mitra yang diakui dan ditransfer langsung ke rekening bank penerima beasiswa.

Implementasi Beasiswa Pancakarsa Berdasar Teori Grindle

Grindle menyatakan bahwa proses implementasi secara umum dapat dimulai ketika tujuan dan sasaran telah ditentukan, program tindak lanjut telah dirancang, dan alokasi dana untuk mencapai tujuan. Ketiga hal tersebut merupakan syarat dasar untuk melaksanakan suatu kebijakan publik. Model teori ini secara konseptual sangat mudah untuk dipahami dan dipahami, namun dalam implementasinya perlu pemikiran yang luas dan waktu yang cukup untuk menguraikan secara rinci pedoman operasional dan teknis bagi pelaksana di lapangan. Keberhasilan implementasi kebijakan publik sangat ditentukan oleh tingkat keterlaksanaan kebijakan itu sendiri, yang terdiri dari isi kebijakan (Content of Policy) dan konteks atau lingkungan implementasi (Context of implementation) yang berkaitan dengan kebijakan tersebut.

a. Isi Kebijakan

Kepentingan yang mempengaruhi. Sasaran dari kebijakan Beasiswa Pancakarsa ini adalah para pemuda Kabupaten

Bogor yang sedang atau ingin melanjutkan pendidikan ke jenjang perguruan tinggi. Adanya program Beasiswa Pancakarsa ini untuk mewujudkan salah satu program Pancakarsa dari Bupati Kabupaten Bogor yaitu Karsa Bogor Cerdas.

Tipe manfaat. Beasiswa Pancakarsa memiliki manfaat yaitu dengan adanya program ini dapat membantu dalam hal biaya para pemuda di Kabupaten Bogor yang sedang atau ingin berkuliah dan meningkatkan kualitas pendidikan di Kabupaten Bogor.

Skala Perubahan yang ingin dicapai. Skala perubahan yang ingin dicapai dari adanya program Beasiswa Pancakarsa ini adalah peningkatan angka pendidikan di Kabupaten Bogor untuk mencapai APK nasional dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia demi mewujudkan Indonesia Emas tahun 2045.

Letak pengambilan keputusan. Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bogor khususnya Tim Koordinasi Pengelola Beasiswa Pancakarsa memiliki andil yang besar dalam pengambilan keputusan pelaksanaan program Beasiswa Pancakarsa.

Pelaksanaan program. Pelaksanaan program Beasiswa Pancakarsa dimulai dari membentuk Tim Koordinasi Pengelola Beasiswa Pancakarsa, melakukan sosialisasi dengan universitas yang akan dijadikan mitra, melakukan branding di media sosial, membuka pendaftaran, melakukan screening terkait berkas pendaftar beasiswa, dan menyelenggarakan pelatihan bagi para awardee atau penerima beasiswa, melakukan evaluasi penerima beasiswa tiap semester. Pelaksanaan program Beasiswa Pancakarsa ini didukung dengan adanya sumber dana dari APBD Kabupaten Bogor dan APBN.

Sumber daya yang dibutuhkan.

Sumber daya yang paling penting dalam pengimplementasian Beasiswa Pancakarsa adalah sumber daya manusia. Maka dari itu dibentuk Tim Koordinasi Pengelola Beasiswa Pancakarsa berdasar Keputusan Bupati Bogor Nomor 422.5/573/Kpts/Per-UU/2020 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Pengelolaan Beasiswa Pancakarsa. Selain itu dalam hal fasilitas adalah web khusus Beasiswa Pancakarsa yang menjadi media pendukung keberlangsungan program Beasiswa Pancakarsa.

b. Lingkungan Implementasi

Kekuasaan. Pihak paling berwenang adalah Kepala Dispora Kabupaten Bogor, pihak pengawas Inspektorat Kabupaten Bogor & BPK Wilayah Provinsi Jawa Barat.

Karakteristik lembaga dan rezim yang berkuasa. Dinas Pemuda dan Olahraga kabupaten bogor ini dianggap memiliki karakteristik yang cocok sebagai lembaga yang menjalankan pengimplementasian beasiswa Pancakarsa. Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bogor sangat merangkul para pemuda di Kabupaten Bogor untuk terus berprestasi dan mereka memfasilitasi secara material dengan memberikan Beasiswa Pancakarsa kepada para pemuda yang ingin terus melanjutkan pendidikan perguruan tinggi.

Tingkat kepatuhan dan respon dari pelaksana. Pada pengimplementasian program Beasiswa Pancakarsa ini dalam hal

responsif dan komunikatif masih dikatakan belum sempurna.

Hambatan Dalam Proses Implementasi Beasiswa Pancakarsa

Berdasarkan informasi yang didapatkan oleh peneliti dari pihak Dinas Pemuda dan Olahraga, Bapak Hendar selaku kepala sub-bidang kepemudaan yang juga menjadi bagian dari pengurus pengimplementasian Beasiswa Pancakarsa mengatakan bahwa, masih banyak kendala atau hambatan yang dihadapi dalam keberlangsungan kebijakan Beasiswa Pancakarsa ini. Tim Koordinasi Pengelola Beasiswa Pancakarsa sendiri belum mendapatkan diklat dari instansi berwenang yang menyebabkan tim Beasiswa Pancakarsa merasakan kesulitan dalam beberapa hal yang memang belum dikuasai. Permasalahan web yang seringkali *down* menjadi salah satu fokus permasalahan utama yang dihadapi oleh tim pengelola Beasiswa Pancakarsa.

Hambatan lain yang dihadapi adalah dikarenakan banyaknya pendaftar khususnya di tahun 2022 dengan perbandingan 1:16 yaitu dengan pendaftar 1.780 orang tetapi yang diterima hanya 107 orang, hal ini menyebabkan banyak oknum yang berusaha untuk curang agar bisa lolos dalam proses penyeleksian Beasiswa Pancakarsa tanpa mengikuti seleksi secara prosedural dengan menggunakan jalur orang dalam. Dalam menangani permasalahan ini, pihak TKPBP berpegang teguh dengan peraturan bupati No. 99 tahun 2021 dan No. 73 tahun 2022 tentang petunjuk pelaksanaan pemberian penghargaan bagi pemuda berprestasi. Tim Koordinasi Pengelola Beasiswa Pancakarsa memanfaatkan media sosial beasiswa Pancakarsa untuk menyebarkan kesadaran akan syarat

minimal berprestasi sebagai langkah preventif.

Tim pengelola Beasiswa Pancakarsa masih berusaha untuk menerapkan sistem digital dalam proses penyeleksian, evaluasi, dan pemantauan dalam pengimplementasian Beasiswa Pancakarsa ini. Tetapi, masih banyak hambatan yang terjadi seperti yang sudah dikatakan sebelumnya yaitu web down atau sering terjadi maintaning server yang menyebabkan kesulitan dalam proses pengimplementasiannya. Pihak Dinas Pemuda dan Olahraga khususnya bidang kepemudaan sendiri pun masih bingung dan kurang menguasai permasalahan dalam ranah digital ini.

Pihak Tim Koordinasi Pengelola Beasiswa Pancakarsa mengaku sedang berusaha untuk memperbaiki dan mengatasi segala kendala yang dihadapi dalam proses pengimplementasian Beasiswa Pancakarsa, mulai dari permasalahan sumber daya manusia yang memang kurang menguasai terkait web Beasiswa Pancakarsa yang sering down sampai terkait pengomunikasian dua arah antara Tim Koordinasi Pengelola Beasiswa Pancakarsa dengan pendaftar atau penerima beasiswa.

PENUTUP

Kesimpulan

Pengimplementasian Beasiswa Pancakarsa sudah berjalan dengan baik tetapi masih ada hal yang harus dibenahi. Beberapa faktor implementasi, antara lain isi kebijakan dan

lingkungan pengimplementasian dari Merilee S. Grindle. Beasiswa Pancakarsa dilaksanakan di Kabupaten Bogor sudah dilaksanakan dengan baik jika kita lihat dari kepentingan yang mempengaruhinya yang dimana fokus untuk kepentingan merealisasikan program Pancakarsa, Karsa Cerdas. Kemudian, tipe manfaat yang bermanfaat membantu para pemuda Kabupaten Bogor yang melanjutkan pendidikan di Perguruan tinggi, skala perubahan yang ingin dicapai terkait mewujudkan Indonesia Emas pada tahun 2045 dan meningkatkan angka pendidikan di Kabupaten Bogor, letak pengambilan keputusan yang dilakukan oleh Tim Koordinasi Pengelola Beasiswa Pancakarsa, pelaksanaan program yang berjalan pun mengikutin sesuai arahan surat keputusan Bupati, sumber daya yang dibutuhkan terkait pengelola dengan membentuk Tim Koordinasi Beasiswa Pancakarsa. Kemudian dilihat dari faktor kekuasaan dan karakteristik lembaga dan rezim yang berkuasa pun sudah berjalan dengan semestinya.

Jika dilihat dari aspek teori implementasi kebijakan Grindle, aspek respon dan kepatuhan dari pelaksana masih harus dibenahi karena masih kurang responsifnya Tim Koordinasi Pengelola Beasiswa Pancakarsa dalam penyebaran Informasi kepada para pendaftar beasiswa. Masih banyak kendala atau hambatan yang dihadapi dalam keberlangsungan kebijakan Beasiswa Pancakarsa ini. Kendala dirasakan baik dari pihak TKPBP, pendaftar, dan penerima beasiswa. Permasalahan web yang sering down adalah kendala utama dalam pengimplementasian kebijakan ini. Selain itu, permasalahan kurangnya informasi yang jelas dan banyaknya informasi simpang siur juga menjadi kendala bagi para pendaftar Beasiswa

Pancakarsa.

Sampai pada saat ini beasiswa pancakarsa masih terus berjalan dan memberikan bantuan kepada para peserta didik perguruan tinggi berdomisili asli kabupaten Bogor yang berkuliah di universitas mitra beasiswa pancakarsa. Para awardee atau penerima beasiswa pun terus giat meraih prestasi dan dapat menjalankan kuliah dengan semestinya dengan adanya beasiswa pancakarsa ini. Beasiswa Pancakarsa pun diharapkan dapat terus meningkatkan angka pendidikan khususnya perguruan tinggi di Kabupaten Bogor terus meningkat.

Saran

Sehubungan dengan kesimpulan di atas, penulis dapat memberikan saran sebagai berikut:

1. Tim Koordinasi Beasiswa Pancakarsa (TKPBP) harus mendapatkan diklat yang sesuai khususnya terkait permasalahan web, agar dapat menunjang sumber daya manusia dalam pengimplementasian Beasiswa Pancakarsa. Web Beasiswa Pancakarsa harus dirancang lebih kompatibel untuk meminimalisir terjadinya down saat web diakses.
2. Tim Koordinasi Beasiswa Pancakarsa (TKPBP) harus lebih informatif dan komunikatif kedepannya. Adanya media sosial

instagram Beasiswa Pancakarsa seharusnya bisa membantu TKPBP untuk menyebarkan informasi yang *up to date* terkait Beasiswa Pancakarsa untuk para calon pendaftar agar tidak ada lagi informasi simpang siur yang membebani para pendaftar.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, S. 2016. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta
- BAAK UPGRISBA. 2022. "Jenis-Jenis Beasiswa." baak.upgrisba.ac.id. <https://baak.upgrisba.ac.id/page/jenis-jenis-beasiswa> (December 8, 2022).
- Creswell, J. W. 2009. "Edisi Tiga Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed". California: Sage Production.
- Dinsos Kabupaten Bogor. 2022. "Visi Dan Misi Pancakarsa Kabupaten Bogor." <https://dinsos.bogorkab.go.id/visi-misi/> (November 13, 2022).
- Dispora Kabupaten Bogor. 2022. "Beasiswa Pancakarsa Kabupaten Bogor." <https://beasiswapancakarsa.bogorkab.go.id/#> (November 12, 2022).
- Faiza, Arum, and Fadil Habibi Danufane. 2021. *Elite Berilmu Dengan Beasiswa Indonesia*. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Grindle, Merilee. 2017. *Politics and policy implementation in the third world*.
- iskandar, J. 2012. *Kapita Selekta Teori Administrasi Negara*. Bandung: Puspaga.
- Kahar, Abdul. 2021. *Beasiswa Pemutus Mata Rantai Kemiskinan*. ed. Rahmat Fadhli. Bandung: Indonesia Emas Group.

- Lester, James P, Stewart, Joseph. 2000. *Public Policy An Evolutionary Approach*, Wadsworth, Stamford, USA.
- Lubis, Lisa Azmi. 2022. "Implementasi Kebijakan Pemberian Beasiswa Bagi Mahasiswa Miskin Berprestasi Dalam Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Di Kabupaten Labuhanbatu Utara." Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan.
- Marla, Alpriyansyah. 2022. *Implementasi Kebijakan Pemberian SPP Gratis Bagi Mahasiswa Di Kabupaten Pangkep Provinsi Sulawesi Selatan*.
- Maulani, Maghfira Fitri. 2018. "Implementasi Program Penyaluran Beasiswa (SPP) Gratis Bagi Mahasiswa Di Kabupaten Pangkajene Dan Kepulauan." Universitas Muhammadiyah Makassar.
- Miles, M., & Huberman, A. M. 2007. *Qualitative Data Analysis*. Jakarta: UI Press.
- Moleong, L. J. 2017. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Nasution, Enty Lafina. 1976. *Pentingnya Pendidikan Dalam Kehidupan Manusia*. Yogyakarta: Deepublish Publisher.
- Nurhabibah, Amalia. 2022. "Efektivitas implementasi program beasiswa Karawang Cerdas di Pemerintahan Daerah Kabupaten Karawang." Sarjana thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.
- Parsons, W. 1995. *Public Policy: an introduction to the theory and practice of policy analysis*.
- Pemerintah Kota Bogor. 2021. *Program Beasiswa Pancakarsa*. Bogor.
- Pramono, Joko. 2020. *Implementasi Dan Evaluasi Kebijakan Publik*. 1st ed. ed. Sutoyo. Surakarta: UNISRI Press.
- Rahman, Abd et al. 2022. "Pengertian Pendidikan, Ilmu Pendidikan Dan Unsur-Unsur Pendidikan." *Al Urwatul Wutsqa: Kajian Pendidikan Islam* 2(1): 1–8.
- Ramadhon, Raka, Riswan Jaenudin, and Siti Fatimah. 2017. "Pengaruh Beasiswa Terhadap Motivasi Belajar Mahasiswa Pendidikan Ekonomi Universitas Sriwijaya." *Jurnal Profit* 4(2): 203–13.
- Singarimbun, M & Effendi, S. 2011. *Metode Penelitian Survei*. Jakarta: LP3S.
- Solichin Abdul Wahab. 2005. *Analisis kebijaksanaan: Dari formulasi ke implementasi kebijaksanaan negara / Solichin Abdul Wahab*. Jakarta Bumi Aksara,.
- Suaib, Hermanto, A. Sakti R. S. Rakia, Arie Purnomo, and Hayat M Ohorella. 2022. *Pengantar Kebijakan Publik*. ed. Abd. Kahar Muzakir. Makassar: Humanities Genius.
- Subarsono, A. 2005. *Analisis Kebijakan Publik. Konsep, Teori dan Aplikasi*. Jakarta: Pustaka Pelajar.
- Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: PT. Alfabet
- Suparno. 2017. *Implementasi Kebijakan Publik Dalam Praktek*. Sidoarjo: Dwiputra Pustaka Jaya

- Tachjan, H. 2006. Implementasi Kebijakan Publik. 1st ed. eds. Dede Mariana and Caroline Paskarina. Bandung: AIPI Bandung.
- Taum, Yoseph Yapi. 2015. Sastra Dan Politik; Representasi Tragedi 1965 Dalam Negara Orde Baru. Yogyakarta: Universitas Sanata Dharma, Yogyakarta.
- Tresiana, Novita, and Noverman Duadji. 2021. Implementasi Kebijakan Publik: Pentingnya Kapital Sosial Dan Koproduksi. Yogyakarta: Suluh Media.
- Utami, Yullya Putri. 2021. "Implementasi Program Pemberian Beasiswa Daerah Untuk Mahasiswa Kabupaten Lamandau." *Journal Ilmu Sosial, Politik dan Pemerintahan* 10(1): 1–12
- Utomo, Fajar Hendro. 2020. "Pengaruh Pemberian Beasiswa Pendidikan Terhadap Partisipasi Berorganisasi Mahasiswa STKIP PGRI Tulungagung." *Jurnal Manajemen Pendidikan* 7(2): 198–208. <https://ejournal.uksw.edu/kelola/article/view/3503>
- Winarno, Budi, 2014. Kebijakan Publik, Teori, Proses dan Studi Kasus. Yogyakarta: CAPS.